

---

## **Kinerja Petugas Lapangan Seksi Kebersihan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih**

### ***Performance of Field Officers in the Cleaning Section of the Prabumulih City Housing and Residential Area Service***

**Yudha Erlangga<sup>1)</sup>, Raniasa Putra<sup>2)</sup> & Ignasius Hendrasmo<sup>1)\*</sup>**

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang

2) Universitas Sriwijaya, Indonesia

---

\*Corresponding Email: [ignasius@unitaspalembang.ac.id](mailto:ignasius@unitaspalembang.ac.id)

#### **Abstrak**

Desa memegang peranan penting dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Penelitian ini mengkaji Dana Desa di Desa Mekar Sari, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, yang telah menerima Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menjelaskan efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Mekar Sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membuka lapangan kerja, seperti pengambilan batu dan pasir, serta meningkatkan pendapatan asli Desa. Pendapatan Desa meningkat sejak adanya Dana Desa. Namun, ditemukan kekurangan dalam pemahaman kepala desa tentang efektivitas pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan Program Rencana Kerja di Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No 4 Tahun 2017 dan kurangnya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Desa; dan Dana Desa.

#### **Abstract**

*Villages play an important role in National Development. The Village Government is obliged to convey public information to the community. This study examines Village Funds in Mekar Sari Village, Kecamatan Rawas Ilir, and North Musi Rawas Regency, which have received Village Funds. The research method used is qualitative descriptive to explain the effectiveness of the use of Village Funds in Mekar Sari Village. The results of the study show that the village head has improved the standard of living of the community by opening jobs, such as taking stones and sand, and increasing the original income of the village. Village income has increased since the existence of the Village Fund. However, there were shortcomings in the village head's understanding of the effectiveness of the use of Village Funds by the Work Plan Program in the North Musi Rawas Regent Regulation No. 4 of 2017 and the lack of openness between the village government and the community to improve the standard of living and quality of life of the community.*

**Keywords:** Effectiveness; Village; and Village Funds.

**How to Cite:** Erlangga, Y., Putra, R., & Hendrasmo, I. (2023), Kinerja Petugas Lapangan Seksi Kebersihan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih. *Journal of Law & Policy Review*. 1 (1): 114-121.

## **PENDAHULUAN**

Organisasi pemerintahan daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dengan sumber legitimasi yang berasal dari masyarakat. Fungsi utama organisasi ini adalah memastikan pelayanan publik yang efisien dan efektif, serta mengelola sumber daya daerah secara optimal. Legitimasi dari masyarakat memberikan dasar hukum dan moral bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk perencanaan pembangunan, penegakan hukum, dan pemberian layanan sosial. Selain itu, legitimasi ini juga menciptakan tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kepentingan publik (Hasibuan & Angelia, 2022; Matondang, 2015; Sianturi et al., 2021). Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat (Septiana & Nawangsari, 2022). Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pemberlakuan sistem desentralisasi pada tata pemerintahan dalam era otonomi daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Prabumulih memegang peran penting dalam mengurus segala hal terkait perumahan dan permukiman di wilayahnya. Mulai dari merumuskan kebijakan, menyalurkan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian layak, menegakkan peraturan bangunan, mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan, hingga mengelola dan memelihara infrastruktur publik terkait perumahan. Disperkim Prabumulih berkomitmen untuk mewujudkan permukiman yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan organisasi, tentunya pegawai dituntut untuk memaksimalkan kinerja yang dia miliki. Kinerja adalah hal yang penting untuk diperhatikan organisasi (Arifin et al., 2022; Khairuddin, 2020; Nurhidayati & Ramadhani, 2022). Terdapat faktor-faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja pegawai, diantaranya adalah menurunnya keinginan pegawai untuk mencapai prestasi kerja, kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga kurang menaati peraturan, dan tidak adanya contoh yang harus dijadikan acuan dalam pencapaian prestasi kerja yang baik. Dalam hal tersebut seorang pemimpin menjadi juru kunci dalam membangun semangat bawahannya bekerja untuk mencapai tujuan organisasi (Anastacia et al., 2021; Delviyandri & Aziz, 2010; Yolanda et al., 2020).

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh para pimpinan adalah bagaimana dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan. Pimpinan yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga orang secara individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai kinerja yang tinggi (Kamaluddin, 2019; Ritonga & Tarigan, 2015). Permasalahan peningkatan kinerja erat kaitannya dengan permasalahan bagaimana memotivasi pegawai, bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, agar pegawai dapat dan mau bekerja optimal sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi (Marsuyetno & Harahap, 2013a, 2013b; Sahupala, 2020). Seorang pemimpin harus mempunyai gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, maka banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, di antaranya adalah kompetensi, motivasi dan budaya kerja (Anastacia et al., 2021; Arifin et al., 2022; Pramawati & Sri Widnyani, 2019). Dalam kompetensi tidak hanya terdapat keterampilan, pengetahuan, dan sikap tetapi bagaimana cara menerapkannya agar sesuai dengan standar kinerja. Kompetensi dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan cepat pula dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerjanya (Adelfina et al., 2022; Manalu et al., 2021; Siregar et al., 2022).

Kinerja merupakan bentuk bangunan organisasi yang bermutu dimensional, sehingga cara mengukurnya bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton dalam Mulyadi,



2006:111). Gambaran fenomena permasalahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dikemukakan di atas tentunya perlu disikapi oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Prabumulih dengan mengupayakan agar setiap unit kerja organisasi yang ada di dalamnya mampu bekerja secara efektif sehingga setiap permasalahan masyarakat yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Prabumulih dapat dicari solusinya..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang kinerja pegawai menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana kinerja petugas lapangan Seksi Kebersihan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih. Metode ini mengandalkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan (Bah et al., 2020b, 2020a). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap kegiatan petugas lapangan, wawancara mendalam dengan petugas dan pimpinan, serta dokumentasi aktivitas dan laporan kinerja.

Analisis data mengikuti pendekatan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang memungkinkan penarikan kesimpulan, seperti tabel, grafik, atau matriks. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data yang telah disajikan.

Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja petugas lapangan Seksi Kebersihan, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja petugas lapangan dalam menjalankan tugas kebersihan di Kota Prabumulih.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih**

#### **a. Kualitas layanan**

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih memiliki empat sektor pengangkutan sampah yang dapat mereka layani. Pertama adalah sampah yang bersumber dari masyarakat. Sampah yang bersumber dari masyarakat ini diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan menggunakan swadaya dari masyarakat sendiri, yang dikoordinasi oleh pihak RT ataupun kelurahan setempat. Biasanya, iuran swadaya ini diperuntukkan bagi personil pengangkutan sampah masyarakat menuju TPS.

Personil ini diperoleh melalui proses lelang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih pada periode tertentu. Setelah terkumpul di TPS, yang mana di tiap-tiap kecamatan memiliki jumlah TPS yang memadai, sampah kemudian diangkut meskipun terkadang volume sampah masih melebihi kapasitas TPS tersebut. Pada saat pengangkutan inilah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih berlangsung. Setiap hari, dua kontainer sampah akan dibawa menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Selain itu, apabila ada kegiatan yang berlangsung dan dibutuhkan penanganan sampah yang segera, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih siap melakukan pembersihan dan pengangkutan dengan mengerahkan Pasukan Gerak Cepat (PASGAT). PASGAT ini bertugas untuk menangani situasi darurat terkait sampah, sehingga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Penanganan yang cepat dan sigap ini merupakan upaya dinas untuk menjaga

kebersihan kota dan memastikan bahwa sampah tidak menumpuk dan menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat.

Selain pengangkutan sampah dari masyarakat, dinas juga menangani sampah dari sumber lainnya seperti pasar, fasilitas umum, dan kawasan komersial. Setiap sektor memiliki metode pengelolaan sampah yang terkoordinasi dengan baik, memastikan bahwa seluruh sampah terangkut dengan efisien. Kerjasama antara dinas, masyarakat, dan sektor swasta ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan adanya sistem yang terorganisir ini, diharapkan masalah persampahan di Kota Prabumulih dapat teratasi dengan baik, memberikan kenyamanan dan kebersihan bagi seluruh warganya. Selain pengangkutan sampah dari masyarakat, dinas juga menangani sampah dari sumber lainnya seperti pasar, fasilitas umum, dan kawasan komersial. Setiap sektor memiliki metode pengelolaan sampah yang terkoordinasi dengan baik, memastikan bahwa seluruh sampah terangkut dengan efisien. Kerjasama antara dinas, masyarakat, dan sektor swasta ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan adanya sistem yang terorganisir ini, diharapkan masalah persampahan di Kota Prabumulih dapat teratasi dengan baik, memberikan kenyamanan dan kebersihan bagi seluruh warganya.

#### **b. Responsivitas**

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih, dalam indikator responsivitas, bekerja sesuai dengan norma organisasi publik yang benar, di mana orientasi dalam mengimplementasikan suatu program adalah demi kepuasan masyarakat itu sendiri. Dalam hal mengenali kebutuhan masyarakat di sektor persampahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih melakukan proses identifikasi melalui survei ke seluruh wilayah kota Prabumulih. Survei tersebut dilakukan oleh individu-individu yang sudah cukup berpengalaman dan menguasai kondisi lapangan yang ada.

Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai jumlah sampah yang dihasilkan, frekuensi pengangkutan yang dibutuhkan, serta masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dengan demikian, dinas dapat merancang dan mengimplementasikan program-program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain survei, dinas juga aktif dalam menerima masukan dan keluhan dari masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti telepon, media sosial, dan langsung ke kantor dinas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas juga menempatkan petugas di berbagai titik strategis untuk memantau dan mengevaluasi kebersihan lingkungan secara langsung. Hasil dari survei dan pemantauan ini digunakan untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam menangani masalah persampahan, sehingga responsivitas dinas terhadap kebutuhan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Upaya ini mencerminkan komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih untuk memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat bagi warganya.

Secara keseluruhan, responsivitas dinas dalam mengelola sampah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang proaktif dan partisipatif. Dengan terus berinovasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Prabumulih akan semakin efektif dan efisien.

#### **c. Responsibilitas**

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih dalam hal keefektifan program yang telah diterapkan bisa dikategorikan belum efektif. Ini dilihat dari pengangkutan sampah dilakukan bukan tanpa ada strategi yang mendasari. Namun Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih melakukan pengangkutan sampah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, volume sampah yang dihasilkan per harinya dan disesuaikan dengan jumlah sarana dan prasarana alat-alat berat dalam hal ini kontener sampah untuk dipertimbangkan agar proses pengangkutan sampah berjalan secara optimal namun kurang efektif.

Dilihat dari garis koordinasi maka sudah mampu dikategorikan secara efektif. Karen tingkat keefektifan juga akan timbul bila ada suatu arahan topdown dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih kepada masing-masing kecamatan. Ini dikarenakan pada dasarnya yang mengetahui secara pasti karakteristik dan pola hidup masyarakat adalah pihak kecamatan atau kelurahan sehingga diharapkan dengan ada pendelegasian ini pengimplementasian program akan berjalan secara efektif.

Selain itu dijelaskan pula bahwasanya program-program yang diterapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih masih memiliki kendala-kendala yang cukup mengganggu. Seperti jumlah armada pengangkutan sampah yang masih kurang seimbang dengan volume sampah yang dihasilkan, cuaca yang seringkali tidak mendukung sehingga memperparah kondisi pengambilan sampah dan proses pengangkutan sampah ke TPA, lalu kondisi jalan yang kurang sesuai dengan alat berat yang dimiliki sehingga memperlambat gerak dari personil untuk melakukan proses pengangkutan sampah.

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih yang mengakibatkan program-program yang dilaksanakan masih kurang efektif adalah belum dicabutnya perwal yang mengatur pengelolaan sampah ke tingkat kecamatan. Dalam hal ini seperti yang disampaikan narasumber bahwasanya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih akan mengalami proses pelayanan persampahan yang terhambat dikarenakan banyaknya kekuasaan yang seharusnya dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih namun dialihkan ke kecamatan yang mana notabeneanya berisi pegawai-pegawai yang hanya memahami kegiatan administrasi saja namun tidak menguasai secara mendalam tentang kondisi lapangan sistem persampahan di kota Prabumulih seperti yang dimiliki oleh para pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih.

#### **d. Akuntabilitas**

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih lebih merincikan bentuk laporan yang disusun antara lain seperti Laporan pertanggungjawaban walikota, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan pencapaian ikhtisar keuangan, laporan monitoring dan pembangunan evaluasi, dan yang secara online ada simonev atau sistem monitoring dan evaluasi yang bekerjasama dengan Pusat Data Elektornik milik Pemerintah Kota Prabumulih. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih kepada Pemerintah Kota Prabumulih serta masyarakat terkait dengan program apa saja yang dihasilkan.

Bentuk transparansi juga dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih dengan menggunakan situs website mereka dimana program kegiatan mereka upload agar masyarakat mengetahui secara rinci mengenai program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan. Selain itu bentuk transparansi juga dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih secara riil dan nyata dengan menyediakan fasilitas umum persampahan yang dicanangkan di program layanan persampahan mereka kepada masyarakat.

Selain itu ada juga hubungan timbal balik yang berlangsung secara mutualisme atau saling menguntungkan antara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih dengan Perusahaan Industri di Kota Prabumulih, dalam melakukan pengelolaan sampah dimana sampah yang sudah dihasilkan dan disaring akan dibuat kompos lalu hasilnya akan didistribusikan dan dipasarkan di daerah sekitar Prabumulih. Selain itu ada juga hubungan timbal balik yang berlangsung secara mutualisme atau saling menguntungkan antara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih dengan Perusahaan Industri di Kota Prabumulih, dalam melakukan pengelolaan sampah dimana sampah yang sudah dihasilkan dan disaring akan dibuat kompos lalu hasilnya akan didistribusikan dan dipasarkan di daerah sekitar Prabumulih.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih**

### **a. Sumber daya manusia**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih menghadapi permasalahan pada indikator sumber daya manusia. Terbatasnya sumber daya lapangan menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah yang volumenya mencapai sekitar 6500 m<sup>3</sup> per hari. Situasi ini diperburuk oleh masih berlakunya peraturan walikota yang mengatur fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih hanya sebagai fungsi koordinasi. Akibatnya, dinas tidak memiliki kuasa untuk memberikan perintah langsung kepada kecamatan yang memiliki sumber daya lebih, namun cenderung berperan dalam bidang administrasi daripada mengelola persampahan secara teknis.

Dengan jumlah petugas lapangan seksi kebersihan sebanyak 233 orang pekerja lepas, dinas harus berupaya keras untuk mengatasi kendala yang ada. Para pekerja ini tidak memiliki status karyawan tetap, yang menyebabkan adanya ketidakpastian dan kurangnya motivasi jangka panjang dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, keterbatasan dalam hal jumlah personil juga berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah, terutama dalam menangani volume sampah yang besar setiap harinya.

Dalam mengatasi tantangan ini, dinas perlu mengupayakan berbagai strategi, seperti meningkatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para petugas kebersihan agar lebih efisien dan efektif dalam bekerja. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengadvokasi pencabutan peraturan walikota yang membatasi fungsi dinas, sehingga mereka dapat memiliki otoritas lebih dalam mengelola sumber daya yang ada di tingkat kecamatan. Dengan demikian, dinas dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara berbagai tingkat pemerintahan dalam mengelola persampahan.

Dinas juga bisa mempertimbangkan untuk mengajukan peningkatan anggaran agar dapat merekrut lebih banyak petugas kebersihan dengan status karyawan tetap, sehingga dapat memastikan kontinuitas dan stabilitas dalam pengelolaan sampah. Penguatan sumber daya manusia ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan di Kota Prabumulih. Secara keseluruhan, peningkatan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam upaya dinas untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan efisien, demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat.

### **b. Sarana dan prasarana**

Keberadaan sarana dan prasarana yang berkualitas menjadikan organisasi lebih mudah untuk menjalankan kinerjanya secara optimal. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan, lebih mengarah pada benda-benda penunjang seperti komputer, mesin, dan peralatan kantor. Sementara itu, prasarana lebih menekankan pada benda-benda bergerak seperti gedung, tanah, maupun sarana transportasi.

Dalam konteks Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih, sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai. Sebagian besar alat-alat berat dan ringan yang dimiliki diambil pada tahun 2000, sementara sarana dan prasarana, terutama alat-alat berat yang digunakan setiap hari untuk mengangkut dan mengelola sampah, memerlukan pengadaan ulang, perawatan, atau paling tidak peremajaan. Penggunaan terus-menerus alat-alat berat memiliki risiko kerusakan yang sangat tinggi serta tingkat korosi yang juga tinggi, yang mengakibatkan penurunan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah.

Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih juga tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya, yang mencapai sekitar 6500 m<sup>3</sup>. Hal ini semakin diperburuk oleh kondisi geografis Kota Prabumulih yang luas dan berbukit, menambah tantangan dalam pengelolaan sampah. Kurangnya jumlah kendaraan pengangkut sampah dan fasilitas pendukung lainnya menyebabkan sampah sering kali menumpuk dan tidak terangkut dengan baik.

Untuk mengatasi masalah ini, dinas perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada. Pengadaan alat-alat baru, peremajaan, dan perawatan berkala

harus menjadi prioritas agar operasional pengelolaan sampah dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, penambahan jumlah sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mengimbangi volume sampah yang besar dan kondisi geografis yang menantang. Dinas juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dalam hal pendanaan dan penyediaan peralatan baru.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih akan dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola sampah, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat kota. Investasi dalam sarana dan prasarana tidak hanya akan meningkatkan efisiensi kerja tetapi juga memperpanjang umur peralatan dan mengurangi risiko kerusakan yang sering kali memerlukan biaya perbaikan yang tinggi.

## SIMPULAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah melalui berbagai sektor, mulai dari sampah masyarakat hingga sampah dari pasar dan fasilitas umum. Kualitas layanan mereka didukung oleh koordinasi antara masyarakat, dinas, dan sektor swasta, serta keberadaan Pasukan Gerak Cepat (PASGAT) yang siap menangani situasi darurat. Responsivitas dinas terlihat dari survei lapangan dan penerimaan masukan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan secara akurat, sementara tanggung jawab mereka dalam hal keefektifan program masih menghadapi kendala, seperti jumlah armada yang kurang memadai dan cuaca yang tidak mendukung. Akuntabilitas dinas tercermin melalui berbagai laporan dan transparansi informasi yang tersedia secara online serta kerjasama mutualisme dengan perusahaan industri dalam pengelolaan sampah menjadi kompos. Meskipun demikian, efektivitas program dapat ditingkatkan dengan perbaikan koordinasi dan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Prabumulih menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tidak memadai. Dengan jumlah petugas kebersihan yang terbatas dan status mereka sebagai pekerja lepas, dinas mengalami kesulitan dalam memastikan efektivitas dan kontinuitas pengelolaan sampah. Selain itu, peralatan yang digunakan sebagian besar sudah usang dan tidak sebanding dengan volume sampah yang harus diangkut setiap hari. Kendala geografis kota yang luas dan berbukit turut memperparah kondisi ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, dinas perlu meningkatkan pelatihan dan kompetensi petugas, mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih mendukung, serta mengajukan peningkatan anggaran untuk pengadaan dan perawatan peralatan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja dinas dapat ditingkatkan, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Prabumulih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelfina, A., Darmana, A., & Rosita, T. (2022). Pengaruh Motivasi Kepuasan Kerja Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Guru SD Rantau Selatan di Labuhanbatu. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1913–1920. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.975>
- Anastacia, D., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2021). Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berbasis Kebutuhan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(September), 176–184. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.748>
- Arifin, M. Z., Sihombing, M., & Kusmanto, H. (2022). Efektifitas Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2379–2390. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1080>
- Bah, Y. M., Ridwan, M., Suharyanto, A., & Amal, B. K. (2020a). Introduction to The Fundamentals of Social Work. *Medan: Bircu Publisher*.

- Bah, Y. M., Ridwan, M., Suharyanto, A., & Amal, B. K. (2020b). Social Work Research. *Medan: Bircu Publisher*.
- Delviyandri, & Aziz, A. (2010). Hubungan Budaya organisasi, Dukungan Organisasi Dan Motivasi Kerja dengan Kinerja KARYAWAN Perusahaan Daerah Air Minum Titanadi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Analitika*, 2(1), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hasibuan, S. R., & Angelia, N. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No . 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Implementation Of Regional Regulations Of Kota Med. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(3), 130–137. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1408>
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228.
- Khairuddin, K. (2020). Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 554–560. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.110>
- Manalu, G., Magister, P., Terbuka, U., Kerja, M., & Pegawai, K. (2021). Analisis Pengaruh Status Kepegawaian Dan Motivasi. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(3), 292–299.
- Marsuyetno, & Harahap, R. H. (2013a). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(2), 271–292. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1349>
- Marsuyetno, & Harahap, R. H. (2013b). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(2), 271–292. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1349>
- Matondang, A. (2015). Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Pelaksanaan Tugas di Bagian Umum Sekretariat Kantor Bupati. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(2), 160–174. <https://doi.org/10.31289/JPPUMA.V3I2.902.G909>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nurhidayati, R., & Ramadhani, A. (2022). Analisis Psychology Capital dan Kinerja Pegawai Puskesmas Rasana'e Timur Kota Bima. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1248–1256. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1476>
- Pramawati, A. A. I. A., & Sri Widnyani, , Ida Ayu Putu. (2019). Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepagwaian Dearah Kabupaten Klungkung. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 204–225. <https://doi.org/10.25077/jakp.2.3.204-225.2017>
- Ritonga, T. E. J., & Tarigan, U. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sub.Dolog Wil.Iv Padangsidimpuan (Studi Pada Kantor Sub.Dolog Wil.Iv Padangsidimpuan). *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 3, 79–92.
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i4.1079>
- Septiana, A., & Nawangsari, E. R. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pengurusan E-KTP terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Candi Sidoarjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1645–1656. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.923>
- Sianturi, R. R., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sei Kambing B. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 185–191. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Siregar, S., Effendy, S., & Ritonga, S. (2022). Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja karyawan Bagian Produksi Pengolahan PTPN III Rantauprapat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1971–1802. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.951>
- Yolanda, H., Hendra, Y., & Matondang, A. (2020). Strategi Downward Communication Pimpinan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan di PT . Pelabuhan Leader ' s Donward Communication Strategy to Inceas Effectiveness of Employee Performance In PT . Pelabuhan Indonesia I. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 106–111.

